

ABSTRAK

Tri Ayu Rizki (1010611029), Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.” (Studi Kasus di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), Di bawah bimbingan Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH.

Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assesment System*, ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pemerintah, wajib pajak bersifat pasif, serta utang pajak timbul saat wajib pajak sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2013 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ditindaklanjuti dalam bentuk pemungutan dengan melibatkan petugas Kelurahan di wilayah pemerintahannya masing-masing. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga/pihak swasta, harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian Sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda administrasi 2% perbulan, serta pada tahun 2013 telah diberlakukan Penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan syarat pemberian penghapusan sanksi bunga dapat diberikan apabila pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan dilunasi terlebih dahulu oleh wajib pajak. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Bumi Bangunan ini berjalan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Tri Ayu Rizki (1010611029), Juridical Analysis of Implementation of Land and Building Tax Collection. "(Case Study in Urban Kalisari, District Pasar Rebo, East Jakarta), Under supervisor of Ms. Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH.

Systems Land and Building Tax Collection is the Official Assessment System, the characteristics of this system is authorized to determine the amount of tax payable is on the government, the taxpayer is passive, as well as tax debts incurred while the taxpayer has received Income Tax (SPPT). Legislation relating to the Land and Building Tax Act No. 28 of 2009 on Local Taxes, Regional Regulation No. 6 of 2010 on General Provisions Local Taxes, Regional Regulation No. 16 Year 2011 on Land and Building Tax, Governor Regulation No. 129 In 2013 on the Granting of Principal Reduction and Elimination of Administrative Sanctions UN Receivable-P2 results from the Delegation of the Central Government. In a poll conducted by the implementation of the local government. Management of Land and Building Tax collection has taken the form involving government officials in the region Village respectively. Withholding tax on land and building can not be handed over to third parties / private parties, must be implemented by the local government. Granting Sanctions against taxpayers who do not pay tax on land and buildings subjected to administrative penalty of 2% per month, and in 2013 had enacted the Elimination of administrative sanctions receivables land and building tax, provided that the removal of sanctions provision of interest can be given if the subject land and building tax receivables repaid advance by the taxpayer. In conducting the study, researchers used a normative study. The approach of this method is to find out how important the legislation governing the Land Tax The building is going according to the provisions of applicable law.

Keywords: Land and Building Tax, Tax Legislation, Local Government.